

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan karakter bukanlah kebijakan baru tentang pendidikan melainkan upaya mengembalikan penyelenggaraan pendidikan kepada esensi yang sesungguhnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut pendidikan karakter harus dikembangkan dalam bingkai utuh sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan karakter merupakan bagian integral dari proses pendidikan, sehingga tidak ada pembatas antara pendidikan akademik dan pendidikan karakter.

Pengembangan karakter harus menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, yang disadari oleh guru sebagai tujuan pendidikan, dan dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang secara langsung dan tidak langsung, yang dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan peserta didik.

Faktanya saat ini semakin banyak siswa yang menyalahi aturan atau melanggar peraturan sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, hal tersebut ditandai dengan hancurnya moral dan nilai perilaku masyarakat sejak dini yang mengakibatkan moral dan nilai perilaku masyarakat tersebut hancur yang akan

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK  
MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terbawa hingga dewasa lalu masa tua kelak. Hal tersebut apabila dibiarkan terus-menerus akan menjadikan sikap siswa tersebut akan terbiasa melanggar peraturan tata tertib di sekolah.

Untuk menghindari masalah tersebut perlu adanya penanaman pendidikan karakter sejak dini pada jenjang sekolah dasar terutama pada jenjang menengah atas. Seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah masih kerap terjadi kasus-kasus pelanggaran tata tertib di sekolah, termasuk para remaja pada jenjang sekolah menengah atas. Sebab masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.

Santrock (2003, hlm. 124) mengemukakan bahwa:

“Remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu : 1) 12-15 tahun, Masa remaja awal ; 2) 15-18 tahun, Masa remaja pertengahan; 3) 18-21 tahun, Masa remaja akhir”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Santrock tersebut menitik beratkan bahwa masa remaja adalah masa transisi baik dari segi biologis maupun psikis, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan khususnya pada jenjang sekolah dari mulai SD, SMP dan SMA.

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK  
MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berbekal pengalaman peneliti selama 6 Bulan dalam kegiatan PPL di SMAN 15 Bandung, peneliti melihat bahwa banyaknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik dalam lingkup sekolah seperti: merokok, tawuran, membolos, kesiangan, tidak mengikuti upacara bendera, dll. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa selama jangka waktu 4 Februari sampai 13 Maret 2017 terdapat 332 siswa yang melakukan bentuk pelanggaran yaitu kesiangan atau sebesar 25,06%, lalu 150 siswa ketahuan merokok disekolah atau sebesar 11,32%, dan 120 siswa atau sebesar 9,06% melakukan bentuk pelanggaran membolos. Yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku kearah negatif saat berada dalam lingkungan sekolah dan mengganggu proses belajar mengajar seperti: selalu ribut dalam kelas, mengobrol saat guru menerangkan, menjahili temannya, membuang sampah dimana saja, keluar kelas saat proses belajar, bermain *gadget*, dll.

Sejalan dengan fungsinya, lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas semata, namun juga menghasilkan manusia yang berakhlak dan berbudi luhur. Searah dengan itu, materi pelajaran yang diberikan tidak hanya berorientasikan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semata, namun juga mencakup pembelajaran tentang iman dan ketaqwaan (IMTAQ) yang berlandaskan dengan *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Sejalan daripada itu ditunjang dengan tata tertib yang merupakan hukum atau aturan yang dapat diterapkan di sekolah, Menurut Departemen Pendidikan dan

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK  
MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kebudayaan (1998, hlm. 37), “Peraturan atau tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswaselama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukungpendidikan”.

Keberadaan peraturan (tata tertib) sekolah berfungsi sebagai pedoman berperilaku bagisiswa selama mereka bersekolah.Dalam lingkungan sekolah tata tertib diperlukanuntuk menciptakan kehidupan sekolah yang tertib, tentram, kondusif dan penuhdengan kedisiplinan. Sehingga keberhasilan proses belajar mengajar dapatterlaksana dengan baik.

Dengan seperti ini ketika ada peserta didik (siswa) yang melakukan pelanggaran memang seharusnya mendapatkan hukuman atau *punishment* untuk memberikan efek jera bagi siswa yang telah melakukan pelanggaran tata tertib, akan tetapi ketika peserta didik (siswa) yang tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau malah mendapatkan prestasi ketika mentaati tata tertib maka seharusnya siswa diberi sebuah ganjaran atau *reward*. Dengan seperti itu pendidik atau pihak sekolah akan menstimulus peserta didik untuk bertindak tidak menyalahi aturan yang ada disekolah tersebut akan tetapi menjadikan motivasi terhadap siswa untuk mantaati aturan supaya siswa dapat mengembangkan watak kewarganegaraannyadengan cara memberikan ganjaran atau *reward* dan hukuman atau *punishment*dari pihak sekolah maupun pendidik.

Sedangkan Menurut Ningsih, A. (2005, hlm. 20), mengemukakan bahwa:

Metode *reward and punishment* merupakan suatu bentuk penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristik.Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.

Menurut penulis penggunaan ganjaran dan hukuman merupakan salah satu cara efektif yang dapat mengembangkan watak kewarganegaraan dalam tata tertib

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sekolah, sehingga peserta didik akan memiliki *civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang baik. Selain itu nantinya peserta didik akan termotivasi untuk berperilaku disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah akibat penggunaan dari ganjaran dan hukuman di lingkungan sekolah.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGUNAAN GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK MENEGAKAN WATAK KEWARGANEGARAAN (*Studi Kasus Analisis SMAN 15 Bandung*).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelaksanaan Tata tertib di SMAN 15 Bandung?
- 2) Bagaimana penerapan sistem ganjaran dan hukuman dalam Tata tertib untuk mengembangkan watak kewarganegaraan pada siswa?
- 3) Bagaimana Hasil pelaksanaan ganjaran dan hukuman dalam mengembangkan watak kewarganegaraan siswa di sekolah?
- 4) Bagaimana Kendala pelaksanaan dan upaya dalam mengembangkan watak kewarganegaraan melalui ganjaran dan hukuman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Atas dasar perumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mencari dari Penggunaan sistem ganjaran dan hukuman dalam tata tertib sekolah untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Studi kasus SMAN 15 Bandung*)

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK  
MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tata tertib di SMAN 15 Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem ganjaran dan hukuman dalam Tata tertib untuk mengembangkan watak kewarganegaraan.
3. Untuk menganalisis hasil pelaksanaan ganjaran dan hukuman terhadap mengembangkan watak kewarganegaraan siswa.
4. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya dalam mengembangkan watak kewarganegaraan melalui ganjaran dan hukuman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya pada jenjang pendidikan SMA pada mata pelajaran PKn. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah strategi yang digunakan di bidang pendidikan khususnya untuk mengatasi masalah – masalah yang sering muncul dalam tata tertib sekolah dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan perilaku sosial, dan interaksi sosial.

### **b. Secara Praktis**

#### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi sebuah patokan kelak dalam hal membina dan mengawasi siswa agar bisa mendidik untuk bersikap, dan bisa mengubah sikap untuk mentaati tata tertib sekolah karena ganjaran dan hukuman tersebut untuk mengembangkan watak kewarganegaraan.

#### **2. Bagi Peserta Didik**

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK  
MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini memberikan gambaran bagi siswa tentang betapa pentingnya watak kewarganegaraan. Bahwa watak kewarganegaraan itu memberikan dampak yang sangat baik dikemudian hari ketika siswa mulai terjun kedalam ruang lingkup masyarakat.

### 3. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi para guru untuk bisa lebih mendidik sikap siswa yang semakin hari semakin tidak bermoral dan menyimpang dari peraturan.

### 4. Bagi sekolah

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan sistem kedisiplinan terhadap siswa disekolah untuk mentaati tata tertib.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari:

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri dari: Latar belakang, menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut diteliti, pentingnya masalah itu diteliti dan pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut baik dari sisi teoritis maupun praktis. Rumusan masalah, berisi rumusan dan analisis masalah sekaligus identifikasi variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya. Tujuan penelitian, menjelaskan hasil yang ingin dicapai setelah dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian, dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya dari segi teori, segi kebijakan, segi praktik dan segi isu serta sosial. Struktur organisasi skripsi, berisi tentang rincian urutan penulisan dari setiap bab dan bagian skripsi, mulai dari bab I sampai bab terakhir.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari konsep-konsep utama dan tujuannya sesuai dengan masalah yang dikaji, didalamnya terdapat pula penelitian terdahulu yang relevan dengan

Deni Suprayogi, 2017

**PENGUNAAN SISTEM GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK  
MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang diteliti dan posisi teoritik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yang diturunkan sub judul.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek/sampel penelitian, desain penelitian, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas mengenai pengolahan atau analisis data untuk mengahasil temuan berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan pembahasan atau analisis temuan.

5. Bab V Kesimpulan dan saran

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan peneliti.